

PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PT. SRITEX TBK.)

¹Firziah Salsabila, ²Farisa Attamimi, ³Nurhastuty Kesumo Wardhani

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta

E-mail: salsabilla4105@gmail.com, farisa.attamimi24@gmail.com,
nurhastuti@trisakti.ac.id

ABSTRAK

Pengangguran tetap menjadi tantangan makroekonomi dan sosial yang terus-menerus di Indonesia, didorong oleh pertumbuhan angkatan kerja yang melampaui penciptaan lapangan kerja, ketidaksesuaian keterampilan, persyaratan perekrutan yang ketat, substitusi teknologi, dan tekanan biaya perusahaan. Makalah ini menerapkan analisis kualitatif deskriptif melalui tinjauan pustaka terstruktur dan studi kasus, referensi peraturan, dan laporan sektoral, dilengkapi dengan pemeriksaan kasus singkat PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Sintesis menunjukkan bahwa pengangguran dibentuk oleh perubahan struktural, gesekan dalam pencocokan pekerjaan, pola musiman, dan kurangnya lapangan kerja, sementara pengangguran yang tinggi melemahkan daya beli dan memperkuat tekanan fiskal, kemiskinan, ketidaksetaraan, risiko kejahatan, dan tekanan rumah tangga. BPS melaporkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,45% pada Februari 2023 (sekitar 7,99 juta orang). Kebangkrutan Sritex menunjukkan bagaimana penurunan daya saing, gangguan rantai pasokan, dan utang yang besar dapat berujung pada PHK massal, dengan 10.665 pekerja kehilangan pekerjaan dan operasi berhenti pada 1 Maret 2025. Respons yang ada seperti Kartu Prakerja, revitalisasi kejuruan, dukungan untuk UMKM/kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja berbasis infrastruktur, dan intermediasi pasar tenaga kerja memerlukan penargetan yang lebih kuat, penyebaran regional yang lebih baik di luar pusat kota, dan keselarasan yang lebih erat dengan permintaan industri. Implikasi disoroti untuk koordinasi lintas sektor antara pendidikan, kebijakan industri, dan perlindungan sosial, untuk mengurangi ketidaksesuaian dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja jangka panjang secara berkelanjutan.

Kata kunci : *Ketenagakerjaan, Pengangguran, Sritex*

ABSTRACT

Unemployment remains a persistent macroeconomic and social challenge in Indonesia, driven by labor-force growth that outpaces job creation, skills mismatch, strict recruitment requirements, technological substitution, and firm cost pressures. This paper applies descriptive qualitative analysis through a structured literature review and case study, regulatory references, and sectoral reports), complemented by a brief case examination of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). The synthesis indicates that unemployment is shaped by structural change, frictions in job matching, seasonal patterns, and underemployment, while high unemployment weakens purchasing power and amplifies fiscal strain, poverty, inequality, crime risks, and household stress. BPS reported an open unemployment rate of 5.45% in February 2023 (around 7.99 million people). The Sritex bankruptcy shows how declining competitiveness, disrupted supply chains, and heavy leverage can end in mass layoffs, with 10,665 workers losing jobs and operations ceasing on 1 March 2025. Existing responses such as Kartu Prakerja, vocational revitalization, support for

UMKM/entrepreneurship, infrastructure-led job creation, and labor-market intermediation require stronger targeting, better regional diffusion beyond urban centers, and tighter alignment with industry demand. Implications are highlighted for cross-sector coordination among education, industry policy, and social protection, to reduce mismatch and raise long-run labor productivity sustainably.

Keyword : *Employment, Unemployment, Sritex*

1. PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia (Frisnoiry et al., 2024). Permasalahan ini telah berlangsung cukup lama dan cenderung mengakar dalam sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan penyediaan lapangan kerja yang tersedia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah angkatan kerja terus meningkat, namun penyerapan tenaga kerja oleh sektor formal tidak mampu mengimbangi lonjakan tersebut. (Tamba & Aprianti, 2025).

Ketimpangan ini diperparah dengan tingginya standar dan persyaratan dalam proses rekrutmen tenaga kerja, seperti batasan usia, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan kemampuan teknis tertentu. Akibatnya, banyak pencari kerja, terutama dari kalangan muda dan kurang berpendidikan formal, kesulitan memasuki pasar kerja (Yhudin et al., 2025). Hal ini memunculkan fenomena *underemployment* (pekerja di bawah kapasitas) dan mismatch antara kebutuhan perusahaan dengan kompetensi pencari kerja.

Sementara itu, tren hubungan kerja di Indonesia saat ini juga menunjukkan dominasi sistem kontrak jangka pendek, seperti kontrak enam bulan atau satu tahun. Sistem ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan, namun menciptakan ketidakpastian bagi pekerja. Dengan status kerja yang tidak tetap, pekerja

cenderung memiliki daya beli rendah dan tidak berani melakukan pengeluaran jangka panjang. Ketidakstabilan ini berkontribusi pada lemahnya konsumsi domestik, yang notabene merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari sisi produksi, perusahaan menghadapi tantangan lain berupa kenaikan harga bahan baku, baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor. Mahalnya bahan baku menyebabkan biaya produksi, *khususnya Cost of Goods Sold (COGS)*, meningkat signifikan. Dalam laporan keuangan, kenaikan COGS yang tidak diiringi oleh peningkatan pendapatan akan menurunkan laba bersih perusahaan (Fotaleno & Batubara, 2024). Untuk tetap bertahan, perusahaan kerap mengambil dua pilihan: menaikkan harga jual (yang berisiko menurunkan permintaan), atau menurunkan kualitas produk (yang bisa merusak reputasi jangka panjang) (Lubis, 2024). Kedua pilihan ini berdampak negatif terhadap kinerja bisnis.

Lebih lanjut, mahalnya bahan baku juga berdampak pada turunnya daya beli masyarakat (Oktaviani et al., 2025). Konsumen menjadi lebih selektif dalam berbelanja dan lebih memilih untuk menyimpan uang (*saving*) daripada membelanjakannya secara konsumtif (P, 2025). Penurunan permintaan ini berdampak langsung pada pendapatan perusahaan, sementara fixed cost seperti sewa, gaji, dan biaya operasional lainnya tetap harus dikeluarkan. Tekanan inilah yang menyebabkan banyak perusahaan mengalami kerugian, bahkan pailit, dan pada akhirnya melakukan efisiensi tenaga

kerja yang berujung pada bertambahnya jumlah pengangguran.

Dari perspektif akuntansi, isu pengangguran dan efisiensi biaya ini sangat relevan untuk dianalisis karena berkaitan langsung dengan penyusunan laporan keuangan, perencanaan anggaran, serta pengambilan keputusan strategis oleh manajemen (Prasetyo, 2025). Oleh karena itu, melalui paper ini, penulis berupaya mengkaji permasalahan pengangguran di Indonesia secara lebih mendalam, dengan mengaitkan faktor-faktor ekonomi makro dan mikro yang memengaruhinya, serta implikasi yang dapat ditinjau dari sudut pandang akuntansi dan bisnis.

2. LANDASAN TEORI

Pengangguran

Pengangguran adalah situasi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau bersedia untuk bekerja. (Fatsabit & Yusran, 2019) Pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Tingginya tingkat pengangguran menandakan bahwa sumber daya manusia belum dimanfaatkan secara optimal, dan hal ini dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Nadya & Syafri, 2019).

Pengangguran terjadi ketika tenaga kerja yang tersedia melebihi jumlah pekerjaan yang tersedia dalam perekonomian (Neno et al., 2024). Dalam sistem ekonomi pasar, pengangguran tidak dapat dihindari sepenuhnya karena adanya pergerakan tenaga kerja antar pekerjaan dan sektor.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pengangguran sebagai penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang sedang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha (Sinaga et al., 2025). Data BPS Februari 2023

menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,45%, yang berarti sekitar 7,99 juta orang belum memiliki pekerjaan namun siap untuk bekerja.

Dalam ekonomi klasik, pengangguran dianggap sebagai akibat dari tidak fleksibelnya pasar tenaga kerja, seperti upah minimum yang terlalu tinggi atau kebijakan ketenagakerjaan yang terlalu ketat (Ardhana et al., 2025). Namun dalam teori Keynesian, pengangguran bisa terjadi karena kurangnya permintaan agregat dalam perekonomian, sehingga perusahaan tidak terdorong untuk memproduksi lebih banyak dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja.

Pengangguran juga mencerminkan adanya inefisiensi dalam alokasi sumber daya, di mana sumber daya manusia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, lambatnya penciptaan lapangan kerja, serta kondisi ekonomi makro yang tidak stabil (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2024).

Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam konteks ekonomi, ketenagakerjaan mencerminkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja, penggunaan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, serta hubungan antara pekerja dan pemberi kerja (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2022).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Definisi ini mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan keamanan kerja.

Dalam pendekatan ekonomi makro, ketenagakerjaan mencakup keseluruhan proses di mana tenaga kerja—sebagai salah satu faktor produksi—digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam perekonomian (Atmodjo et al., 2023). Kualitas dan kuantitas tenaga kerja menjadi indikator utama dalam mengukur produktivitas nasional dan potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

3. METODOLOGI

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena secara mendalam melalui penggambaran, penafsiran, serta analisis terhadap data non-numerik (Sakir, 2024). Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai permasalahan pengangguran dan ketenagakerjaan di Indonesia.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan antar variabel secara statistik, melainkan untuk mengkaji dan menjelaskan fenomena pengangguran berdasarkan teori ekonomi, data sekunder, serta kondisi aktual yang terjadi di Indonesia (Abdussamad, 2021).

Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama, melainkan melalui berbagai literatur dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi buku teks dan literatur ilmiah di bidang ekonomi dan akuntansi, data dan publikasi resmi dari lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), artikel dan

berita dari media massa nasional yang kredibel, serta dokumen dan informasi resmi dari perusahaan terkait studi kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik pengangguran dan ketenagakerjaan di Indonesia.

Melalui studi kepustakaan, penulis memperoleh landasan teori, konsep, serta informasi empiris yang digunakan untuk mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, kemudian disusun secara sistematis untuk menjelaskan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2020).

Tahapan analisis data meliputi pengumpulan data, pengelompokan data sesuai topik pembahasan, analisis dan interpretasi data berdasarkan teori ekonomi dan kondisi aktual, serta penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Studi Kasus

Sebagai pendukung analisis, penelitian ini menggunakan studi kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Studi kasus ini digunakan untuk memberikan gambaran nyata mengenai dampak pengangguran yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat kebangkrutan perusahaan.

Melalui studi kasus ini, penulis menganalisis faktor-faktor penyebab kebangkrutan perusahaan serta

dampaknya terhadap tenaga kerja, industri, dan perekonomian nasional, sehingga dapat memperkuat pembahasan teoritis yang telah dipaparkan sebelumnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Pengangguran di Indonesia

Penyebab pertama banyaknya pengangguran di Indonesia adalah minimnya lapangan pekerjaan. Banyak masyarakat yang telah lulus dan menjadi seorang sarjana dan warga lulusan SMA/SMK maupun SMP yang telah siap kerja memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Namun, banyaknya warga yang siap kerja tersebut harus bersaing ketat, karena lapangan kerja yang tersedia di negara tersebut tidak banyak. Sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran (Sinaga et al., 2025).

Penyebab kedua adalah kurangnya keterampilan dan pendidikan yang rendah (Baidah et al., 2025). Ketika melamar sebuah pekerjaan untuk posisi tertentu, tentu perusahaan akan menyertakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar pekerjaan. Contohnya seperti pelamar harus lulusan minimal SMA dan melampirkan bukti berupa ijazah atau memiliki keterampilan khusus.

Oleh karena itu, apabila pelamar kerja tidak memiliki keterampilan khusus maupun tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh perusahaan maka pelamar tersebut tentu akan tereliminasi dari posisi tersebut. Sehingga masyarakat yang ingin mencari kerja harus memenuhi persyaratan keterampilan maupun tingkat pendidikan yang diajukan oleh perusahaan.

Ketiga, kemajuan teknologi. Dalam beberapa hal kemajuan teknologi tentu berdampak baik untuk manusia, kemajuan teknologi bertujuan untuk mempermudah manusia, namun ternyata kemajuan

teknologi juga dapat berdampak buruk, dimana peran manusia digantikan oleh mesin sehingga kesempatan kerja semakin kecil (Adha et al., 2020).

Teknologi yang semakin maju dapat menggantikan manusia yang sebelumnya melakukan kegiatan produksi secara manual, tetapi mesin dapat menggantikan tenaga manusia dan membuat pekerjaan lebih dan murah. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang memutuskan mengurangi pegawainya dan menggantikan tugas pegawai sebelumnya dengan teknologi yang baru. Hal inilah yang menyebabkan pengangguran menjadi meningkat (Al-Kansa et al., 2023).

Keempat, pemanfaatan tenaga kerja tidak seimbang. Karena perusahaan yang berada tentu memiliki persyaratan dan standar yang cukup tinggi ketika merekrut karyawan, sehingga warga yang tinggal di kota pun menyesuaikan hal tersebut dengan menambah keterampilan serta memiliki pendidikan yang tinggi (Baidah et al., 2025).

Berbeda dengan tenaga kerja di desa, warga desa terkadang tidak terlalu diperhatikan dan lapangan kerja yang ada di desa pun sedikit. Kebanyakan warga di desa memilih menjadi petani atau menggarap lahan orang lain, namun tenaga kerja seperti petani dan lainnya tidak dimanfaatkan lebih baik. Sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran.

Kelima, persyaratan pekerjaan yang terlalu tinggi. Selain tidak memiliki keterampilan serta tingkat pendidikan yang rendah, perusahaan terkadang mematok persyaratan yang terlalu sulit dan mengharuskan tenaga kerja untuk memiliki keterampilan yang tinggi. Tinggi harapan perusahaan kepada tenaga kerja tersebut membuat pengangguran meningkat dan menyebabkan terjadinya pengangguran (Yusniar & Heriyana, 2021).

Keenam, banyaknya PHK. Penyebab selanjutnya dari terjadinya pengangguran adalah PHK. Pemutusan

Hubungan Kerja atau PHK umumnya diberlakukan oleh suatu perusahaan untuk menstabilkan kondisi perusahaan yang saat itu dinilai sedang goyah atau terancam bangkrut. PHK biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan pemecatan kepada karyawan dalam jumlah yang besar dan menyebabkan terjadinya pengangguran (Hasibuan et al., 2023).

Penyebab ketujuh adalah persaingan pasar global. Perusahaan asing banyak mendirikan perusahaannya di Indonesia, hal tersebut tentu dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Sayangnya kebanyakan perusahaan asing yang berdiri di Indonesia lebih memilih merekrut tenaga kerja dari asing pula. Sehingga persaingan global yang terjadi di negara sendiri semakin ketat dan mempersempit peluang warga negara untuk mendapatkan pekerjaan serta menyebabkan terjadinya pengangguran (Hasibuan et al., 2023).

Kedelapan, masalah geografis. Umumnya perusahaan akan membangun kantornya berada di kota, di mana penduduk kota biasanya memiliki keterampilan tinggi untuk dapat memajukan perusahaan tersebut serta tingkat pendidikan yang tinggi pula (Syamsiyah, 2017).

Oleh karena itu, penduduk kota lebih besar mendapatkan peluang pekerjaan dibandingkan dengan warga yang tinggal di desa. Selain itu, perusahaan juga cenderung memilih atau memberikan persyaratan kepada pelamar yaitu berdomisili dekat dengan kantor atau perusahaan tersebut.

Faktor kesembilan adalah kemiskinan struktural. Hal ini dikarenakan warga atau penduduk miskin biasanya tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, seperti hingga ke jenjang perkuliahan. (Avrianti, 2024) Walaupun begitu tentu saja pemerintah telah berupaya agar setiap warga negaranya mendapatkan

pendidikan yang cukup melalui pembiayaan serta mengadakan beasiswa bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dampak Pengangguran Terhadap Perekonomian dan Kehidupan Sosial Masyarakat di Indonesia

Pengangguran bukan hanya masalah sosial, tapi juga masalah fiskal. Jumlah pengangguran yang tinggi membuat pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak uang (pengeluaran naik), sementara penerimaan dari pajak dan sektor ekonomi lainnya menurun, itulah yang menyebabkan keuangan negara menjadi membengkak (Frisnoiry et al., 2024).

Angka kriminalitas cenderung meningkat seiring dengan tingginya angka pengangguran karena keterbatasan akses terhadap penghasilan mendorong sebagian individu untuk mencari jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan atau kesulitan mendapatkan pekerjaan dalam waktu yang lama, tekanan ekonomi, rasa frustrasi, dan ketidakpastian masa depan dapat mendorong mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti pencurian, penipuan, atau bahkan kekerasan (Nadya & Syafri, 2019). Selain itu, pengangguran sering kali menyebabkan menurunnya harga diri dan melemahnya ikatan sosial, yang memperbesar peluang seseorang untuk terlibat dalam aktivitas kriminal, terutama jika mereka berada di lingkungan yang juga memiliki tingkat pengangguran tinggi. Dalam konteks ini, pengangguran bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga menjadi pemicu masalah sosial yang lebih luas, termasuk meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pengentasan pengangguran juga berarti upaya pencegahan terhadap meningkatnya tindakan kriminal di tengah masyarakat.

Selain itu, konflik antara masyarakat dengan pemerintah dapat

muncul akibat tingginya angka pengangguran karena masyarakat merasa kecewa dan tidak puas terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan serta mengelola perekonomian. Ketika tingkat pengangguran terus meningkat, terutama di kalangan usia produktif, masyarakat cenderung menilai bahwa pemerintah gagal menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara negara yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Rasa frustrasi dan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat pengangguran dapat berkembang menjadi kemarahan yang terakumulasi, dan dalam kondisi tertentu bisa memicu aksi protes, demonstrasi, hingga kerusuhan sosial. Apalagi jika masyarakat melihat adanya ketimpangan sosial, korupsi, atau kebijakan ekonomi yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil, maka kepercayaan terhadap pemerintah bisa semakin menurun (Avrianti, 2024).

Kesenjangan kesempatan bekerja dapat muncul sebagai dampak dari tingginya angka pengangguran karena persaingan dalam dunia kerja menjadi semakin ketat, sementara lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Dalam kondisi ini, hanya individu dengan kualifikasi tinggi seperti pendidikan yang lebih baik, pengalaman kerja yang relevan, dan keterampilan khusus yang memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan. Sebaliknya, mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah, pendidikan rendah, atau tinggal di wilayah terpencil cenderung tersisih dari pasar tenaga kerja. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu mengakses pekerjaan berkualitas dengan kelompok yang terus terpinggirkan.

Fenomena ini memperlebar jurang sosial dan ekonomi, karena sebagian masyarakat terus mengalami mobilitas ekonomi ke atas, sementara yang lain terjebak dalam kemiskinan akibat

pengangguran berkepanjangan. Kesenjangan inilah yang memperparah ketidakadilan dalam distribusi kesempatan kerja di masyarakat.

Kehilangan keterampilan merupakan salah satu dampak signifikan dari pengangguran, terutama jika seseorang menganggur dalam jangka waktu yang lama. Ketika seseorang tidak lagi terlibat dalam aktivitas kerja secara rutin, kemampuan teknis maupun non-teknis yang dimilikinya cenderung menurun karena tidak digunakan atau diasah secara berkelanjutan. Misalnya, keterampilan dalam mengoperasikan alat, menggunakan perangkat lunak, atau berkomunikasi secara profesional bisa menjadi tumpul akibat kurangnya praktik (Adha et al., 2020). Selain itu, perkembangan teknologi dan metode kerja yang terus berubah juga membuat keterampilan yang dimiliki penganggur menjadi usang dan tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang terbaru. Jika kondisi ini dibiarkan, maka penganggur akan semakin kesulitan untuk bersaing ketika peluang kerja muncul kembali, karena mereka dianggap tidak lagi memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pengangguran tidak hanya berdampak pada hilangnya penghasilan, tetapi juga pada penurunan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Menurunnya daya saing merupakan salah satu dampak penting dari pengangguran karena ketika banyak tenaga kerja tidak terserap dalam dunia kerja, potensi sumber daya manusia tidak dimanfaatkan secara optimal (Guna, 2025). Individu yang menganggur dalam waktu lama cenderung kehilangan motivasi, keterampilan, dan produktivitas, sehingga tidak mampu bersaing baik di pasar kerja lokal maupun global. Selain itu, pengangguran yang tinggi juga mencerminkan ketidakefisienan dalam sistem pendidikan dan ketenagakerjaan suatu negara, yang pada akhirnya memengaruhi citra dan kepercayaan investor terhadap kualitas tenaga kerja di

negara tersebut. Dalam skala makro, pengangguran menurunkan output ekonomi nasional dan memperlemah posisi daya saing negara dalam perdagangan internasional, karena kurangnya inovasi, efisiensi, dan produktivitas. Akibatnya, negara tersebut berisiko tertinggal dalam persaingan ekonomi global karena tidak mampu menghadirkan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan industri modern.

Meningkatnya angka kemiskinan merupakan dampak langsung dari tingginya angka pengangguran karena ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, maka ia kehilangan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Tanpa penghasilan yang tetap, individu atau keluarga akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga berisiko jatuh ke dalam kategori miskin. Dalam jangka panjang, pengangguran yang terus berlanjut dapat menggerus tabungan, memaksa orang menjual aset, atau bahkan berutang hanya untuk bertahan hidup (Wina, 2019). Selain itu, ketika banyak anggota masyarakat mengalami pengangguran secara bersamaan, daya beli masyarakat secara keseluruhan juga menurun, yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan memperluas lingkaran kemiskinan. Kondisi ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana pengangguran menyebabkan kemiskinan, dan kemiskinan pada akhirnya menyulitkan individu untuk mendapatkan kembali pekerjaan karena keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan.

Politik yang tidak stabil dapat menjadi salah satu dampak dari tingginya angka pengangguran karena ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi ekonomi sering kali berujung pada ketegangan sosial dan politik (Derkenbaeva et al., 2025). Ketika banyak warga negara kehilangan pekerjaan dan

merasa tidak mendapatkan perhatian atau solusi dari pemerintah, muncul rasa kecewa, frustrasi, dan ketidakpercayaan terhadap pemimpin atau sistem pemerintahan yang sedang berjalan. Hal ini bisa memicu gelombang protes, demonstrasi besar-besaran, bahkan kerusuhan sosial, terutama jika pengangguran disertai dengan ketimpangan sosial dan ekonomi yang mencolok. Dalam situasi seperti itu, stabilitas politik terganggu karena pemerintah harus mengalihkan fokusnya dari pembangunan ke penanganan krisis sosial (Singha & Singh, 2022). Ketidakstabilan ini juga berdampak pada investasi dan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lingkaran negatif yang semakin memperburuk kondisi pengangguran dan memperlemah legitimasi pemerintah di mata rakyat (Aisen & Veiga, 2011).

Meningkatnya konflik dalam rumah tangga merupakan salah satu dampak nyata dari pengangguran karena tekanan ekonomi yang dihadapi keluarga dapat memicu stres, ketegangan emosional, dan perasaan frustrasi di antara anggota rumah tangga. Ketika salah satu atau bahkan seluruh pencari nafkah dalam keluarga kehilangan pekerjaan, kestabilan finansial terganggu sehingga kebutuhan sehari-hari sulit dipenuhi. Hal ini dapat menimbulkan rasa cemas, rasa tidak aman, dan saling menyalahkan di antara pasangan atau anggota keluarga lainnya. Ketidakharmonisan ini bisa berkembang menjadi pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perpisahan. Selain itu, pengangguran juga dapat memengaruhi harga diri seseorang, terutama jika ia merasa gagal menjalankan peran sebagai pencari nafkah, yang semakin memperburuk hubungan interpersonal di dalam keluarga. Oleh karena itu, pengangguran tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap kestabilan dan keharmonisan rumah tangga.

Strategi yang Dilakukan Oleh Pemerintah Untuk Mencegah dan Mengatasi Pengangguran di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi untuk mencegah dan mengatasi pengangguran, baik melalui kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut adalah beberapa strategi utama yang telah dilakukan:

Pemerintah menyelenggarakan berbagai program pelatihan kerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas kesempatan kerja (Hidayat, 2020). Program seperti Kartu Prakerja memberikan pelatihan dan bantuan finansial kepada pencari kerja untuk meningkatkan keterampilan mereka.

Melalui program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), pemerintah mendorong masyarakat untuk menciptakan peluang kerja sendiri dan meningkatkan keterampilan kerja. Program ini dirancang untuk mendukung individu dalam menciptakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran (Jaelani et al., 2025).

Program PEN dirancang untuk memulihkan ekonomi pasca-pandemi dan menciptakan lapangan kerja melalui berbagai insentif, termasuk pembangunan infrastruktur dan dukungan kepada sektor-sektor terdampak.

Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dengan meningkatkan belanja publik di bidang tertentu, seperti program pembangunan infrastruktur dan ekonomi, untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Selain itu, kebijakan moneter seperti penetapan suku bunga yang lebih rendah memudahkan masyarakat dan dunia usaha memperoleh pinjaman untuk investasi, yang pada gilirannya dapat menciptakan pekerjaan baru.

Pemerintah terus melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan

vokasi untuk memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini dilakukan melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan penyediaan fasilitas pelatihan yang memadai.

Penyediaan Bursa Pasar Kerja. Pemerintah menyelenggarakan bursa pasar kerja untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mempercepat proses penempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran.

Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRITEX)

Sejarah Perusahaan

PT Sritex (Sri Rejeki Isman) didirikan pada tahun 1966 oleh H. Soedhanto, seorang pengusaha Indonesia, yang memiliki visi untuk membangun industri tekstil yang dapat mendukung kebutuhan pasar domestik dan internasional. Berawal dari usaha kecil yang fokus pada produksi kain, Sritex berhasil berkembang pesat berkat strategi ekspansi yang cerdas, kualitas produk yang terjamin, serta kemampuan beradaptasi dengan tren pasar global. Pada tahun 1980-an, Sritex mulai memperkenalkan teknologi canggih dalam proses produksinya, yang memungkinkan perusahaan untuk memproduksi kain dengan standar internasional (PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), 2018).

Di bawah kepemimpinan keluarga, PT Sritex semakin memperluas kapasitas produksinya dengan mendirikan beberapa pabrik di berbagai daerah di Indonesia. Pada awal 2000-an, Sritex berhasil memperoleh sertifikasi internasional dan mulai mengeksport produknya ke berbagai negara di Asia, Eropa, dan Amerika. Perusahaan ini dikenal dengan kualitas produk tekstil yang tinggi, terutama dalam bidang kain untuk seragam militer, pakaian jadi, serta tekstil industri. Sritex juga terkenal sebagai salah satu pemain

utama di sektor garmen Indonesia, yang menyerap ribuan tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap perekonomian lokal.

Namun, meskipun Sritex pernah mencapai puncak kejayaan dan mendominasi pasar tekstil Indonesia, tantangan besar mulai muncul pada dekade berikutnya. Tekanan dari peningkatan biaya bahan baku, persaingan harga yang ketat, serta perubahan tren pasar menyebabkan penurunan kinerja perusahaan. Pada akhirnya, Sritex terjebak dalam masalah keuangan dan manajerial yang mempengaruhi keberlanjutan operasionalnya, yang pada gilirannya mengarah pada kebangkrutan dan kesulitan finansial yang signifikan sebelum akhirnya mengalami proses pailit.

Kasus

Kasus Sritex, raksasa tekstil Indonesia, berujung pailit karena gagal melunasi utang yang besar. Perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang setelah tidak mampu membayar utang sindikasi US\$350 juta pada 2021. Utang tersebut direstrukturisasi, namun gagal, dan akhirnya Sritex dililit utang yang terus membengkak hingga mencapai US\$1,6 miliar atau sekitar Rp 24,66 triliun. Kepailitan ini menyebabkan PHK massal terhadap ribuan karyawan dan penutupan operasional Sritex per 1 Maret 2025.

Penyebab Kasus

Perusahaan Tak Mampu Bersaing. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan suatu perusahaan pailit adalah jika ia tidak mampu bersaing di pasar. Artinya, ketika perusahaan tidak berinovasi atau melakukan inovasi dengan lamban, sementara kebutuhan konsumen berubah dengan cepat. Apalagi dengan tren dan produk baru yang bermunculan setiap saat.

Perusahaan bisa membuat kesalahan dengan kurang cermat

mengamati gerakan pesaing, sehingga menjadi tertinggal. Ketertinggalan perusahaan akan berdampak pada pendapatan, laba, dan kemampuan keuangannya.

Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, sempat mengungkapkan bahwa pendapatan Sritex menurun akibat dampak pandemi Covid-19 serta persaingan industri global. Bahkan, ia menambahkan, pandemi dan kompetisi dagang tersebut telah menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan.

Kondisi Pasar Sulit. Berkaca pada kasus Sritex, ada faktor industri tekstil yang sedang tidak baik-baik saja. Selain tak mampu bersaing, direktur keuangan Sritex berkata perusahaan itu juga terpengaruh situasi geopolitik di berbagai negara.

“Kondisi geopolitik perang Rusia-Ukraina serta Israel-Palestina menyebabkan gangguan supply chain (rantai pasok) dan juga penurunan ekspor, karena terjadi pergeseran prioritas oleh masyarakat di kawasan Eropa dan Amerika Serikat,” ucap Welly pada 24 Juni 2024.

Dia juga menjelaskan bahwa penurunan pendapatan perusahaan dilatarbelakangi oleh adanya suplai tekstil yang berlebihan dari Cina. Akibatnya, terjadi praktik dumping (menjual barang di luar negeri dengan harga lebih murah), khususnya tekstil yang menargetkan negara di luar Eropa dan Cina.

Pengambilan Keputusan Buruk. Perusahaan yang kerap membuat keputusan buruk dapat berujung mengalami pailit. Misalnya jika perusahaan menetapkan harga terlalu mahal di pasar, melakukan ekspansi berlebihan, atau melakukan pengeluaran tak terkendali.

Sritex pada akhirnya mencatatkan kinerja keuangan yang buruk selama beberapa tahun belakangan. Perusahaan itu memiliki utang usaha kepada kreditur sekaligus penggugatnya yakni PT Indo

Bharat Rayon sebesar Rp 100.308.838.984.

Raksasa tekstil itu memiliki total liabilitas sebesar US\$ 1.597.894.876 atau sekitar Rp 25 triliun. Liabilitas tersebut didominasi liabilitas jangka panjang sebesar US\$ 1.466.477.101 atau sekitar Rp 23 triliun.

Tanggungans finansial jangka panjang Sritex didominasi oleh utang bank sebesar US\$ 809.994.386 atau Rp 12,7 triliun. Sritex memiliki utang bank jangka panjang kepada 28 bank.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah utang Sritex tembus Rp 14,64 triliun. Jumlah tersebut adalah total utang tercatat Sritex kepada 27 bank dan tiga perusahaan multifinance per September 2024.

Dampak Kasus

Kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) berdampak besar terhadap tenaga kerja, industri tekstil, dan perekonomian nasional. Sebanyak 10.665 karyawan kehilangan pekerjaan, terutama di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang menjadi pusat operasional perusahaan. Gelombang PHK ini menurunkan daya beli masyarakat dan melemahkan sektor perdagangan serta jasa di sekitar kawasan industri. Di sisi industri, banyak pemasok bahan baku seperti kapas, benang, dan bahan kimia kehilangan pasar utama, menyebabkan penurunan produksi hingga kebangkrutan sejumlah pemasok kecil. Industri garmen dan manufaktur pakaian jadi yang bergantung pada pasokan kain dari Sritex juga mengalami dampak signifikan, melemahkan daya saing sektor tekstil dalam negeri. Dari aspek keuangan, kebangkrutan ini meningkatkan risiko kredit macet di perbankan karena Sritex memiliki utang besar kepada beberapa bank nasional dan internasional. Kepercayaan investor terhadap industri tekstil menurun setelah harga saham Sritex anjlok sebelum akhirnya dihapus dari Bursa Efek Indonesia. Situasi ini memperburuk iklim investasi di sektor

manufaktur yang sudah tertekan oleh persaingan global dan banjirnya produk impor murah.

5. KESIMPULAN

Permasalahan pengangguran di Indonesia merupakan tantangan serius yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Pengangguran terjadi akibat ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja, rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan, kemajuan teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia, serta tingginya standar rekrutmen perusahaan. Selain itu, faktor eksternal seperti globalisasi, krisis geopolitik, dan pandemi juga memperparah situasi ketenagakerjaan.

Pengangguran menimbulkan dampak negatif yang signifikan, seperti meningkatnya angka kriminalitas, kesenjangan sosial, kemiskinan, konflik rumah tangga, hingga ketidakstabilan politik. Studi kasus bangkrutnya PT Sritex menunjukkan bagaimana lemahnya daya saing, keputusan manajerial yang buruk, dan ketergantungan pada pasar luar negeri dapat memperburuk situasi dan memicu pemutusan hubungan kerja secara massal.

Pemerintah telah merespons permasalahan ini melalui berbagai kebijakan dan program seperti Kartu Prakerja, dukungan terhadap UMKM, revitalisasi pendidikan vokasi, dan pembangunan infrastruktur. Namun, upaya tersebut masih membutuhkan penguatan dan pemerataan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Adha, L. H., Asyhadie, Z., & Kusuma, R. (2020). *Digitalisasi Industri dan*

- Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja di Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(2), 268–298. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.49>
- Aisen, A., & Veiga, F. J. (2011). *How Does Political Instability Affect Economic Growth?* (Issue WP/11/12). <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1112.pdf>
- Al-Kansa, B. B., Iswanda, M. L., Kamilah, N., & Herlambang, Y. T. (2023). Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Pola Hidup Manusia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(3), 2966–2975. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.682>
- Ardhana, A. Y. A., Syazeedah, H. N. U., Fitriyaningrum, R. I., & Gunawan, A. (2025). Analisis Ketidaksesuaian antara Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Kerja di Indonesia. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(4), 1020–1026. <https://doi.org/10.55182/kompeten.v3i4.63128>
- Atmodjo, D. S. S., Sumbogo, I. A., & tim penulis. (2023). *Pengantar Ekonomi Makro*. PT Kreasi Skrip Dijital. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/40130-Full_Text.pdf
- Avrianti, A. E. (2024). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Sinjai*.
- Baidah, B., Mislaini, M., & Hijaya, D. (2025). Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 3(1), 45–55. <https://doi.org/10.59246/alfihris.v3i1.1142>
- Derkenbaeva, S., Galushkina, E., Soodonbekova, A., Beksultanov, A., & Kozubekova, S. (2025). Impact of global economic instability on social policies: Adaptation and resilience strategies. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 101946. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101946>
- Fatsabit, M. I., & Yusran, H. L. (2019). Pengaruh Keterbukaan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), 71–84. <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5304>
- Fotaleno, F., & Batubara, D. S. (2024). Fenomena Kesulitan Generasi Z dalam Mendapatkan Pekerjaan Ditinjau Perspektif Teori Kesenjangan Generasi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(8), 1–9.
- Frisnoiry, S., Sihotang, H. M. W., Indri, N., & Munthe, T. (2024). Analisis Permasalahan Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(1), 365–374. <http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak>
- Guna, G. A. (2025). *Dampak Sosial dari Penerapan Sistem Informasi Terpadu Ketenagakerjaan (SIDUTA) dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*. http://eprints.ipdn.ac.id/24316/1/32.0071_Galuh_Arya.pdf
- Hasibuan, E. F. D., Dotulong, L. O. H., & Uhing, Y. (2023). Dampak Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Mahakarya Cipta Nusantara Timika Papua. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(3). <https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.3.50697>
- Hidayat, A. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Era Globalisasi. *Registratie: Jurnal*

- Ilmiah Pendidikan*, 2(1), 5–12.
<http://eprints.ipdn.ac.id/6283/1/Registries/IPDN%20Vol%20No%201%20tahun%202020/LENGKAP-halaman-5-12.pdf>
- Jaelani, I., Jamiel, H. N., & Acim. (2025). Pendampingan Usaha Bagi Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) Kabupaten Pangandaran. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(9), 1119–1126.
<https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i9.9836>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). *Glosarium Ketenagakerjaan Tahun 2021*.
https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2022/03/files/publikasi/1648177529190_Glosarium%2520Ketenagakerjaan%2520Tahun%25202021.pdf
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2024). *Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Menurut Sektor dan Jabatan Tahun 2025–2029*.
https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2024/10/files/publikasi/1737083891980_Proyeksi%2520Kebutuhan%2520Tenaga%2520Kerja%2520Menurut%2520Sektor%2520dan%2520Jabatan%2520Tahun%25202025-2029.pdf
- Lubis, B. (2024). *Ekonomi Manajerial: Teori dan Praktik untuk Keberhasilan Bisnis* (M. G. Efgivia (ed.); Cetakan pe). CV Widina Media Utama.
<https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/588224-ekonomi-manajerial-54df7229.pdf>
- Nadya, A., & Syafri. (2019). Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), 37–52.
<https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5300>
- Neno, R. A., Saleh, S. E., Dai, S. I. S., & Mulyati, Y. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Teluk Tomini 2017-2021. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan (JSEP)*, 1(3), 84–99.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55182/jsep.v1i3.63128>
- Oktaviani, S., Merdiyanti, K., Salsabilla, N., Syuhada, S., Imelia, Rahma, S., & Apriyanto, Y. (2025). Kenaikan Harga Barang Pokok Mempengaruhi Inflasi dan Stabilitas Politik: Studi Ekonomi Politik di Pasar Aur Duri Jambi. *Journal of Economic Education*, 4(1), 80–87.
<https://doi.org/10.22437/jeeec.v4i1.45270>
- P, M. M. F. (2025). *Analisis Pengaruh Literasi Keuangan dan Financial Technology terhadap Gaya Hidup Hedonisme Mahasiswa IAIN Palopo*.
[https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/10751/1/NASKAH SKRIPSI MUHATIR MUH FAKTA P.pdf](https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/10751/1/NASKAH%20SKRIPSI%20MUHATIR%20MUH%20FAKTA%20P.pdf)
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2022/03/files/publikasi/1648177529190_Glosarium%2520Ketenagakerjaan%2520Tahun%25202021.pdf
- Prasetyo, A. (2025). Peran Akuntansi Manajerial dalam Pengambilan Keputusan Strategis pada UMKM. *JIAKPRO: Jurnal Ilmiah Akuntansi Profetik*, 3(1), 7–12.
<https://doi.org/10.55182/jiakpro.v3i1.600>
- PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). (2018). *Sejarah Kami*.

- <https://www.sritex.co.id/id/sejarah-kami/>
- Sakir, I. M. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Method*. Filosofis Indonesia Press.
- Sinaga, C. O., Khairunissa, W., & Siburian, P. A. (2025). Analisis Kurangnya Lapangan Pekerjaan Pada Usia Angkatan Kerja di Kota Binjai, Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 40946–40952.
<https://doi.org/10.55182/jpt.v9i3.63128>
- Singha, K., & Singh, M. A. (2022). Political stability and its effect on economy: some lessons from Sikkim Himalaya. *Journal of Social and Economic Development*, 24(2), 340–354.
<https://doi.org/10.1007/s40847-022-00199-9>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Syamsiyah, N. (2017). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Alkesa Lestari RW. 003 Cipadak Jagakarsa Jakarta Selatan*.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36935/1/NU R SYAMSIYAH-FDK.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36935/1/NU%20R%20SYAMSIYAH-FDK.pdf)
- Tamba, F. E., & Aprianti, Y. (2025). ANALISIS KONDISI MAKRO EKONOMI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA (ANALYSIS OF MACROECONOMIC CONDITIONS ON LABOR ABSORPTION IN INDONESIA). *Jurnal Riset Pembangunan*, 8(1), 1–15.
- Wina, A. (2019). Hubungan Negatif Antara Tingkat Inflasi Dengan Tingkat Kemiskinan Di Wilayah Perdesaan Provinsi Lampung. *STATISTIKA: Journal of Theoretical Statistics and Its Applications*, 19(1), 63–69.
<https://doi.org/10.29313/jstat.v19i1.4587>
- Yhudin, A., Ardhana, A., Nurfitriah, H., & Syazeedah, U. (2025). Analisis Ketidaksesuaian antara Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Kerja di Indonesia. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(4), 1020–1026.
- Yusniar, & Heriyana, N. (2021). Pengaruh Ketrampilan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Yang Dimediasi Oleh Beban Kerja Pada Usaha Kerajinan Tas Aceh Di Ulee Madon. *Jurnal Visioner & Strategis*, 10(2), 89–94.
<https://doi.org/10.29303/jvs.v10i2.1142>